

TIPOLOGI KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin



OLEH :

ADITYA NUGRAHA NURSALAM

A 111 06 071

ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2012

TIPOLOGI KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR



OLEH

ADITYA NUGRAHA NURSALAM

A 111 06 071

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abd. Hamid Paddu, MA.

Drs. Anas Iswanto Anwar, MA

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat dan karunianya yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Hasanuddin. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan beberapa pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Ali, SE, Msi. Selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmatia, MA Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. H. Abd. Hamid Paddu, MA selaku dosen pembimbing I dan bapak Drs. Anas Iswanto Anwar, MA selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberi arahan selama penulisan ini berjalan.
4. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.
5. Orang tuaku Drs. Nursalam S, Umar dan St, Hartini kalianlah yang menjadi inspirasi dari seluruh kebaikan yang pernah ada dalam diriku, di usia kalian yang renta semoga gelar ini mampu memberi sedikit kelegahan bagi kalian, terimakasih my Live.
6. Saudara-saudaraku di rumah Rafika Nursalam, Skm. Muh. Reza Rafsanjani, Feyzar Rahmat dan Annisa Pratiwi, terima kasih karena kalian adalah saudara yang terbaik.
7. Sodara-Sodara ZETAN 06 (Asdar, Rais, Oby, Acha') kalian Awal dari sebuah cerita dan semoga mimpi kita semua terwujud, amin ya rabb.
8. Yang tercinta teman-teman seperjuangan HIMATU Squad (Noel, Ocop, Marmud, Ari korpala, Enoz, Zepti, Zoel jahat, Hendrik, pa'dee) status alumni takkan pernah bisa mengganti dan merubah cerita yang pernah kita buat bersama, Long Live.
9. Teman-Teman angkatan 06 Ilmu Ekonomi Veir spiritum, semoga kalian menemukan kebahagiaan hidup masing-masing.

10. Seluruh keluarga besar Sp corps, terkhusus buat angkatan Solid 03 (K'Fajar,K'sandra pamangin, K'Noge, K' cosmos, K'Arham, K'nanang, K'ilo dll) thanks kanda buat ilmu dan kebbaikannya.
11. Buat angkatan 07,08,09,10 sampe yang terakhir 011 Ilmu Ekonomi selamat berproses adik-adik, jadikan kampus sebagai proses kalian lebih maju.
12. Seluruh keluarga besar SENAT Fakultas Ekonomi Universitas hasanuddin.
13. Seluruh teman-teman d UKPM unhas,Medkom,LBH-Makassar,Walhi sulsel, Fbs UNM, Toko buku Ide-fix dan seluruh organ-organ gerakan yang pernah menjadi tempat berproses.
14. Terkhusus buatmu Sub-Comandante Irsyanomics yang tidak pernah mundur, salut buatmu sodara.
15. Wawan, Ulla 05 pemerintahan ditambah Deri ,anci,upi,dekkeng thank sodara atas beberapa bulan diawal saya menulis skripsi ini (Kost di Sahabat).
16. Keluarga besar KKN gel,80 Kec, Barru Kab,Barru.
17. Keluarga besar IKMB UH dan PMB UH LATENRITATTA.
18. Sodara-sodaraku d Blotig comunity Toddopuli VI, serta terkhusus Lembo, Pay,Aci ,Rais, Punkd, dan Marlank semoga bisa berbuat untuk kalian.
19. Teman sekaligus Sodara yang selalu menemani Bang juned dan personil Ca Creative lainnya, terima kasih all semoga kita bisa menjadi sesuatu yang besar.
20. Mace-mace kolong yang selalu tersenyum walau selalu rugi, semoga bisa membalas kebaikan kalian semua.
21. Seluruh pegawai dan staff sampai Cleaning servis Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
22. Komunitas kolong, semoga selalu ramai dan melahirkan generasi baru.
23. Mapala-Se fis Universitas Hasanuddin dan teman-teman Mapala se-makassar semoga tetap lestari.

Penulis menyadari dari penulisan skripsi ini masih jauh dari kempurnaan, oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapakan kritik dan saran agar dapat menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Makassar, 1 juni 2012

Penulis

,

Abstrak

Aditya Nugraha, *Tipologi Kemiskinan Di Kota Makassar (dibimbing oleh Bapak Dr. H. Abd. Hamid Paddu, dan bapak Drs. Anas Iswanto Anwar, MA.)*

Tipologi kemiskinan yang paling dominan di Kota Makassar adalah tipologi kemiskinan kultural yang dimana tipologi kemiskinan ini mencapai 42,3% lebih besar dibandingkan tipologi kemiskinan natural sebesar 27,4% dan tipologi kemiskinan structural sebesar 31,3%.disamping itu, yang perlu dipahami kemiskinan kultural ini berdasarkan indikator masyarakat Makassar yang masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap takdir serta memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak. Kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan regulasi juga dianggap menjadi salah satu penyebab kemiskinan Struktural seperti: Masih berpihaknya pemerintah terhadap pembangunan pasar modern dibandingkan pasar tradisional, masih maraknya terjadi penggusuran,dan kurangnya ketersediaan lapangan kerja.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Tipologi.....	7
2.2 Teori dasar kemiskinan dan Teori pengentasannya.....	7
2.3 Kerangka Pikir	18
2.4 Hipotesis	19
2.5 Tipe-tipe kemiskinan	19
2.6 Studi empiris	20
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi penelitian	22
3.2 Jenis dan Sumber Data	22
3.2.1 Jenis data	22
3.2.2 Sumber data	23
3.3 Populasi dan sampel	23
3.4 Metode pengumpulan data	24
3.5 Metode analisis	24

3.6 Batasan Defenisi dan variabel	25
---	----

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum kemiskinan di Kota Makassar	27
4.2 Keadaan penduduk Kota Makassar.....	28
4.2.1. Tabel Jumlah Penduduk kota Makassar	29
4.3 Gambaran umum Responden.....	30
4.3. Tabel kriteria penduduk miskin kota makassar.....	30
4.3.1. Tipologi Kemiskinan di Kota Makassar.....	33
4.3.1.1. Pasar Modern Sebagai penyebab kemiskinan struktural.....	33
4.3.1.2. Makan nasi aking sebagai bentuk kemiskinan Cultural akibat Banyaknya anggota keluarga.....	36
4.3.1.3. Perempuan dan Kemiskinan Natural.....	37
4.3.1.4. Penggusuran sebagai bentuk kemiskinan Struktural.....	39
4.3.2. Analisis Kemiskinan di Kota Makassar.....	43
4.4 Penanggulangan kemiskinan Kota Makassar.....	50

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah suatu fenomena sosial yang terjadi diseluruh belahan dunia manapun, baik di Negara berkembang maupun Negara yang memiliki kemapanan ekonomi. Fenomena ini pada dasarnya telah menjadi perhatian, isu, dan gerakan global yang bersifat kemanusiaan (*humanity*). Hal ini didasarkan konferensi tingkat tinggi dunia yang berhasil menggelar Deklarasi dan Program Aksi untuk Pembangunan Sosial (*World Summit in Social Development*) di Compenhagen pada tahun 1995. Fenomena sosial yang dipandang perlu penanganan segera dan menjadi agenda Tingkat Tinggi Dunia tersebut adalah kemiskinan, pengangguran, dan pengucilan sosial yang ada di setiap negara. Secara konstitusional, permasalahan dimaksud telah dijadikan perhatian utama Bangsa Indonesia sejak tersusunnya Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini, diperkuat oleh (Nasikun:1995) yang mengemukakan bahwa kemiskinan adalah sebuah fenomena multifase, multidimensional, dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumberdaya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar tersebut, antara lain: informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kapital.

Permasalahan tentang fenomena kemiskinan tidak kunjung selesai. Sehingga kemiskinan terus menjadi tema menarik untuk dikaji dan didalami. Hal itu disebabkan karena

kemiskinan merupakan permasalahan global yang kompleks, dinamis, polemis, dan mendesak. Dikatakan *kompleks*, ia sering kali muncul tanpa membedakan ras maupun suku, seperti Aceh, Ambon, Papua, Sulawesi, Jawa, semuanya meminjam bahasa *Syauqi Amin* memiliki koleksi masyarakat miskin. Dikatakan *dinamis* karena dalam kenyataannya ia terus mengalami dinamisasi seiring dengan perubahan ruang dan waktu, *polemis* karena ia mengundang banyak orang-tanpa membedakan statusnya untuk turut berpartisipasi dalam membincangnya, mulai dari apa itu kemiskinan, sebab-sebabnya, dampaknya dalam realitas kehidupan, dan langkah untuk mengantisipasinya. Semua orang sepakat bahwa ia merupakan hal yang *mendesak* mengingat imbasnya yang terlalu luas.

Dalam World Summit for Social Development, dipahami bahwa kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya, kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat, kehidupan bergelandangan dan tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya.

Sementara itu, menurut *Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations* menyatakan bahwa kemiskinan terjadi karena adanya pengingkaran hak-hak manusia, karena itu kemiskinan tidak mungkin diatasi tanpa realisasi hak-hak manusia.

Sedangkan *Asian Development Bank* (2006), memahami masalah kemiskinan sebagai perampasan terhadap aset-aset dan kesempatan-kesempatan penting dimana individu pada dasarnya berhak atasnya. Dalam pendekatan baru ini diakui adanya hambatan-hambatan struktural yang menyebabkan tidak terealisasinya hak-hak orang miskin.

Kemiskinan di Indonesia harus dibaca dalam konteks kemiskinan dunia saat ini. Ada sekitar satu miliar manusia yang dikategorikan *extreme poor*. Jika ditambah yang *poor* (yaitu 1,5 miliar), ini berarti ada 2,5 miliar atau 40% penduduk bumi ini adalah orang miskin. Mereka ini tidak hanya mengecap nikmat hidup, tetapi juga terancam maut setiap hari (World Bank, 2009).

Begitupun dengan kondisi di beberapa daerah yang ada di Indonesia, seperti Makassar. Permasalahan penduduk miskin Kota Makassar diantaranya ialah jumlah penduduk miskin cenderung meningkat, administrasi / pendataan jumlah penduduk miskin ditingkat Kelurahan masih memerlukan pembenahan, kemampuan sumber daya dan keterampilan penduduk miskin sangat terbatas, kesehatan / gizi keluarga miskin masih rendah, kemampuan keluarga miskin menyekolahkan anak sangat terbatas, partisipasi masyarakat / swasta dalam penanggulangan kemiskinan belum memadai, penataan lingkungan pemukiman terutama kantong-kantong penduduk miskin belum memenuhi standar lingkungan pemukiman yang memadai. Belum ditunjang dengan sarana prasarana perkotaan yang memadai (jalan setapak, sanitasi dan penerangan jalan, air bersih, dll), keterpaduan / koordinasi antara pihak terkait dalam penanggulangan kemiskinan (Pemerintah , Perguruan Tinggi, Ornop / LSM, Masyarakat , Swasta) perlu sasaran program

optimalisasi, koordinasi antara lintas Kabupaten/ Kota yang belum optimal.

Berbagai teori, analisis, dan perspektif yang disodorkan bermuara pada titik bagaimana menemukan cara-cara terbaik untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi momok masyarakat yang harus segera diperangi karena: *Pertama*, kodrat manusia sebagai makhluk berakal budi menanamkan dalam diri setiap manusia kemampuan untuk bertransendensi. Akal budi menjadi penjamin bagi manusia untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya. Akal budi menjadi 'harta karun' yang pada dasarnya sanggup membebaskan manusia dari aneka kemelut hidup, termasuk kemiskinan. Kodrat akal budi tidak pernah menghendaki manusia hidup dalam kemiskinan, tetapi sebaliknya. *Kedua*, dari “rahim” kemiskinan, kita menghadapi aneka persoalan kemanusiaan yang memilukan. Kita tentu sering menyaksikan kemalangan orang miskin, atau mungkin kita juga pernah terjepit dalam kemiskinan. Kemiskinan menjadi masalah global justru karena sebagian besar orang merasakan dahsyatnya dampak yang ditimbulkannya (Sumodiningrat, 2006).

Citra '*Indonesia adalah negara miskin*' tidak ada yang membantah. Data-data kuantitatif yang bisa dibaca dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan pemerintah serta lembaga internasional misalnya Bank Dunia, mempertegas citra kemiskinan itu. Banyak warga di sejumlah tempat yang menjadi kantong kemiskinan menolak disebut miskin hanya karena pada kenyataan mereka masih bisa makan dan minum. Mereka tidak mati karena kekurangan makan. Mereka masih memiliki tetangga, sanak saudara, komunitas, dan lingkungan yang memberi pengharapan bahwa kemiskinan tidak akan mematikan. Tetapi apa yang terjadi di makassar, kematian daeng Rani (seorang pemulung di pasar pabaeng-baeng) karena kelaparan. Kemiskinan yang gagal diperangi oleh pemerintah di mana pun di dunia ini

adalah tidak sekadar kegagalan pembangunan. Kemiskinan yang telah mengakibatkan warga meninggal karena tidak mampu memperoleh makan dan minum yang mencukupi adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan.

Secara umum, jumlah penduduk miskin di Kota Makassar pada tahun 2006 sebesar 7,5%. Selanjutnya pada tahun 2007, jumlah penduduk miskin mencapai 5,86%. Memasuki tahun 2008, jumlah penduduk miskin sebesar 5,6%. Memasuki tahun 2009, jumlah penduduk sebesar 5,4%. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin menjadi 5,8%. (*Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2010*)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul ***“Tipologi Kemiskinan di Kota Makassar”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Diantara tipologi kemiskinan Struktural, Kultural dan Natural, tipologi kemiskinan apakah yang dominan di Kota Makassar ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini, yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis tipologi kemiskinan yang ada di Kota Makassar berdasarkan persepsi masyarakat (responden).

Manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai aplikasi ilmiah untuk mengetahui serta membuktikan teori-teori yang berkenaan dengan penulisan ini.
2. Sebagai salah satu studi yang diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan/ referensi bagi yang ingin melakukan penelitian yang relevan dengan materi dari skripsi ini, serta pihak lain yang memiliki perhatian terhadap isu-isu kemiskinan
3. Sebagai bentuk sumbangan pemikiran bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tipologi

Tipologi atau *typology* berasal dari kata Yunani, tupos"(kadang ditrasliterasikan "*typos*" kata darimana kata Inggris "*type*" berasal) dan "logos". Tipologi atau *typology* adalah studi tentang tipe-tipe.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tipologi, karena beberapa penelitian tentang kemiskinan sebelumnya, hanya melihat kemiskinan secara umum. Pengkajian tipologi kemiskinan ini diharapkan mengangkat suatu realitas kemiskinan yang sebelumnya tidak tersentuh sehingga lahir pengkajian yang lebih mendalam dan lebih dekat dengan realitas.

2.2 Teori dasar kemiskinan dan teori pengentasannya

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Untuk memahami pengertian tentang kemiskinan ada sebagai pendapat yang dikemukakan. Menurut Suparlan (1995), kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan

rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Sedangkan menurut Bank Dunia kemiskinan adalah apabila pendapatan seseorang kurang dari US\$1 per hari (setara Rp8.500,00 per hari).

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS): tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu kurang dari 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2009) menjelaskan kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Pendapat lain dikemukakan oleh Ala dalam Setyawan (2009) yang menyatakan kemiskinan adalah adanya gap atau jurang antara nilai-nilai utama yang diakumulasikan dengan pemenuhan kebutuhan akan nilai-nilai tersebut secara layak.

Amartya Sen (Arif: 1998) menjelaskan bahwa masalah kemiskinan bukan sekedar masalah lebih miskin daripada orang lain dalam masyarakat, melainkan masalah tidak dimilikinya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan material secara lain, kegagalan mencapai “tingkat kelayakan minimum tertentu,” hal ini disebabkan karena kemiskinan dipahami sebagai kegagalan mencapai tingkat kelayakan minimum, maka kriteria kelayakan minimum haruslah ditentukan secara absolut, dengan jumlah yang sama antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain.

Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumberdaya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar tersebut, antara lain: informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kapital. Lebih dari itu, hidup dalam kemiskinan sering kali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang rendah terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan-pilihan hidup yang sempit dan pengap.

Hall dan Midgley (2004), menyatakan kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat. Sementara *John Friedman (1979)*, mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada) modal yang produktif (misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan, dan lainnya) sumber-sumber keuangan, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang; pengetahuan, keterampilan yang memadai dan informasi yang berguna.

Dalam *World Summit for Social Development*, dipahami bahwa kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya, kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus

meningkat, kehidupan bergelandangan dan tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya. (*Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2008*).

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, mereka tidak hanya didekati sebagai *objek* (gejala yang diamati), tetapi harus dipandang sebagai *subjek* atau pelaku yang dikelompokkan dalam golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah (GMBR). Mereka adalah pelaku yang berperan sepenuhnya untuk menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu, dalam kerangka memahami potensi keluarga miskin, paling tidak terdapat tiga bentuk potensi yang diamati, yakni kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, tinjauan tentang kemampuan dalam memenuhi kebutuhan akan dilihat dari aspek pengeluaran keluarga, *human capital* atau kemampuan menjangkau tingkat pendidikan dasar formal yang ditamatkan, dan *security capital* atau kemampuan menjangkau perlindungan dasar. Kemudian kemampuan dalam pelaksanaan peran sosial yaitu tinjauan tentang kemampuan peran sosial akan dilihat dari kegiatan utama dalam mencari nafkah, peran dalam bidang pendidikan, peran dalam bidang perlindungan, dan peran dalam bidang kemasyarakatan. Dan yang terakhir adalah kemampuan dalam menghadapi permasalahan yaitu tinjauan tentang kemampuan dalam menghadapi permasalahan, akan dilihat dari upaya mereka lakukan untuk mempertahankan diri dari tekanan ekonomi dan non ekonomi.

Konsekuensi dari kemiskinan adalah tidak adanya pilihan bagi penduduk miskin (*poverty giving most people no option*) untuk mengakses kebutuhan-kebutuhan dasar, seperti: kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan ekonomi atas kepemilikan alat-alat produksi yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan.

Kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar kebutuhan hidup minimum, yang meliputi makanan dan non-makanan. Nilai standar kebutuhan minimum makanan mengacu pada harga dan tingkat konsumsi dari 52 jenis makanan yang menghasilkan energi 2100 kalori sedangkan non-makanan terdiri 27 paket komoditi untuk perkotaan dan 25 komoditi untuk pedesaan yang dalam hal ini mewakili pola konsumsi penduduk kelas bawah. Nilai standar kebutuhan minimum digunakan sebagai garis batas kemiskinan atau garis kemiskinan non makanan. Batas kecukupan makanan ditetapkan sebesar nilai pengeluaran untuk makanan yang mampu menghasilkan energi sebesar 2.100 kalori per-kapita per-hari.

Batas kecukupan non makanan adalah sebesar nilai rupiah yang dikeluarkan penduduk kelas bawah untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum non makanan yaitu perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan aneka barang serta jasa lainnya. Menurut Kuncoro (1997), ada tiga hal yang menjadi penyebab munculnya kemiskinan, yakni ketidaksamaan kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang; kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia; dan kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan dalam mengakses modal.

Sumodiningrat (2001), mengidentifikasi penyebab kemiskinan yang sangat kompleks dan saling terkait, yaitu kualitas sumber daya manusia yang rendah, baik motivasi, maupun penguasaan manajemen, dan teknologi; kelembagaan yang belum mampu menjalankan dan mengawal pelaksanaan pembangunan; prasarana dan sarana yang belum merata dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan; minimnya modal; dan berbelitnya prosedur dan peraturan yang ada.

Ada dua pendekatan untuk mengukur kemiskinan antara lain, ukuran kemiskinan absolut, ialah konsep absolut memberi indikator mengenai keadaan perekonomian suatu daerah yang sebagian penduduk mendapatkan nafkah yang hanya dapat dipakai untuk memenuhi taraf kehidupan minimum dan ukuran kemiskinan relatif yang didasarkan pada tingkat kesepadanan pendapatan dan lingkungan sekitar. Penentuan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum menggunakan kriteria Sayogyo, yaitu tingkat konsumsi ekuivalen beras perkapita sebagai indikator kemiskinan, dengan membedakan tingkat ekuivalen daerah pedesaan, apabila seseorang hanya mengkonsumsi ekuivalen beras kurang 240 Kg perkapita pertahun, maka mengkonsumsi ekuivalen digolongkan sangat miskin, sedangkan untuk daerah perkotaan ditentukan sebesar ekuivalen 360 Kg perkapita pertahun.

Kemiskinan absolut dan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang/keluarga. Kedua istilah itu merujuk pada perbedaan sosial (social distinction) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Perbedaananya adalah pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif, kategorisasi kemiskinan

ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk. Kategori ini dapat digunakan untuk mengukur kemiskinan konsumsi maupun kemiskinan keterbelakangan yang bersifat multidimensi.

Dalam kemiskinan absolut, standar kemiskinan dihitung berdasarkan nilai uang yang dibutuhkan untuk membayar jumlah kalori minimal yang dibutuhkan untuk hidup sehat dan kebutuhan non-makanan tertentu; Tingkat pendidikan yang dianggap tertinggal ditetapkan berdasarkan kemampuan membaca/menulis (melek huruf) atau kelulusan dari sekolah dasar. Standar-standar ini tidak akan berubah meskipun tingkat kemakmuran masyarakat berubah. Standar kemiskinan absolut digunakan untuk menganalisis angka kemiskinan oleh dunia dengan menetapkan garis kemiskinan \$ 1 per orang per hari dan angka kemiskinan yang dihitung Badan Pusat Statistik (BPS).

Kemiskinan relatif memandang kemiskinan berdasarkan kondisi riil tingkat kemakmuran masyarakat. Garis kemiskinan ditetapkan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan penduduk di suatu daerah; Ketertinggalan pendidikan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas.

Dalam penanggulangan masalah kemiskinan melalui program bantuan langsung tunai (BLT), BPS pun telah menetapkan 14 (empat belas) kriteria keluarga miskin, seperti yang telah disosialisasikan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (2009), rumah tangga yang memiliki ciri rumah tangga miskin, yaitu: luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang; jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan; jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester; tidak memiliki fasilitas buang air

besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain; sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; sumber air minum berasal dari sumur /mata air tidak terlindung/sungai/air hujan; bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah; hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu; hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari; tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik; sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan; pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD sampai SLTP; serta tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Nasikun (1995), menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu: *Policy induces processes* yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (induced of policy) diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitasnya justru melestarikan; *Socio-economic dualism* adalah negara ekskoloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor; *Population growth* adalah perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedang pertambahan pangan seperti deret hitung; *Recources management and the environment* yakni adanya unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan

menurunkan produktivitas; *Natural cycles and processes* adalah kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, di mana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.

The marginalization of woman yaitu peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki; *Cultural and ethnic factors* adalah bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan; *Exploitative intermediation* adalah keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir (lintah darat); *Internal political fragmentation and civil strife* adalah suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan; *International processes* adalah bekerjanya sistem sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi semakin miskin.

Pekerjaan sosial melihat bahwa kelompok sasaran dalam menangani kemiskinan harus mencakup tiga kelompok miskin secara simultan. Dalam kaitan ini, maka seringkali orang mengklasifikasikan kemiskinan berdasarkan “status” atau “profil” yang melekat padanya yang kemudian disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Gelandangan, pengemis, anak jalanan, suku terasing, jompo terlantar, penyandang cacat (tubuh, mental, sosial) dll adalah beberapa contoh PMKS yang sering diidentikan dengan sasaran pekerjaan sosial di Indonesia. Belum ada hasil penelitian yang komprehensif

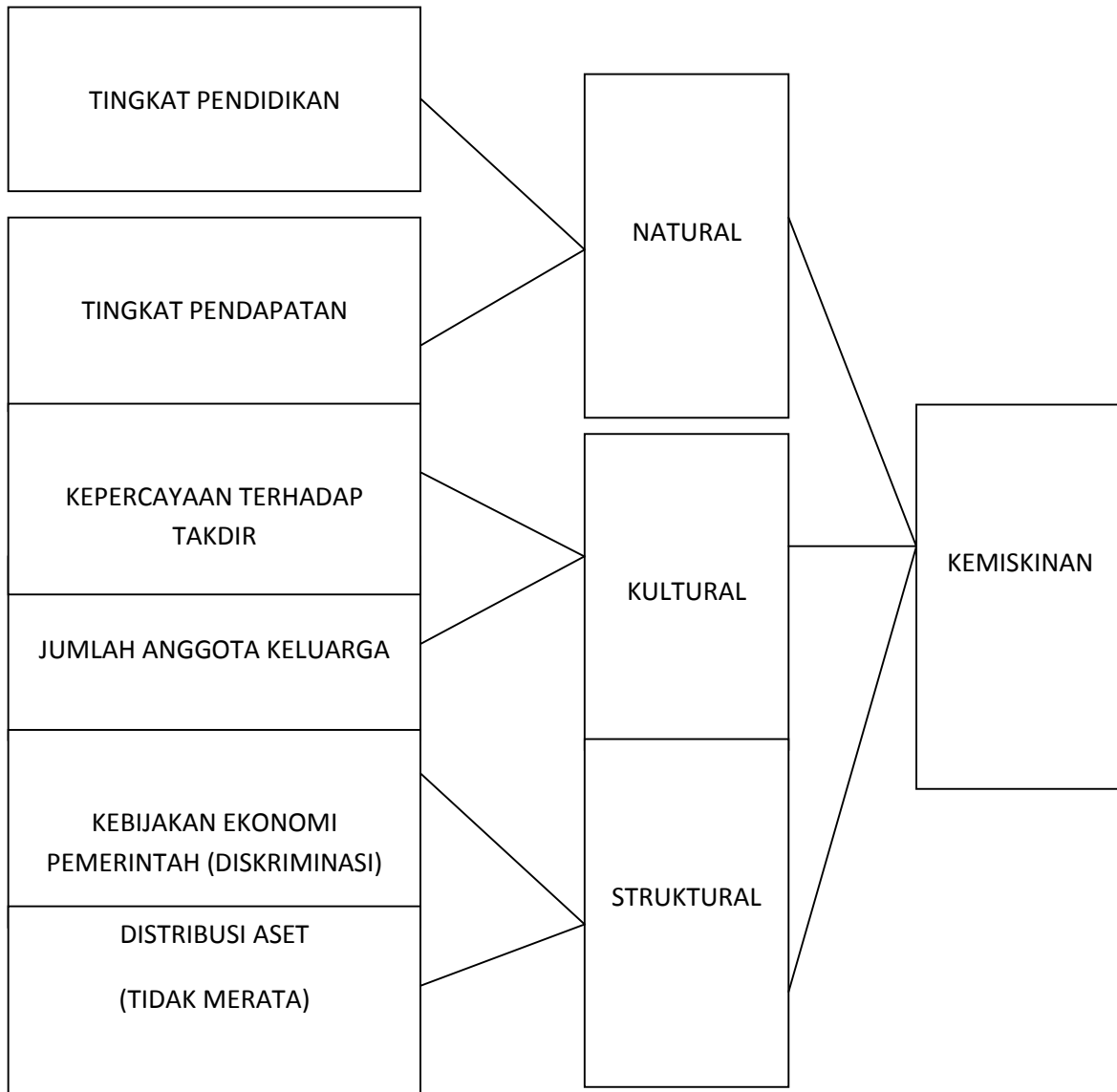
apakah mereka ini tergolong pada kelompok destitute, poor atau vulnerable. Namun dapat diasumsikan bahwa PMKS bisa berada diantara ketiga kategori kemiskinan di atas. Sesuai dengan konsepsi mengenai keberfungsian sosial, strategi penanganan kemiskinan pekerjaan sosial terfokus pada peningkatan kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan statusnya. Karena tugas-tugas kehidupan dan status merupakan konsepsi yang dinamis dan multi-wajah, maka intervensi pekerjaan sosial senantiasa melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya.

Prinsip ini dikenal dengan pendekatan “person-in-environment dan person-in-situation”. Pada pendekatan pertama, pekerja sosial melihat penyebab kemiskinan dan sumber-sumber penyelesaian kemiskinan dalam kaitannya dengan lingkungan dimana si miskin tinggal, baik dalam konteks keluarga, kelompok pertemanan (peer group), maupun masyarakat. Penanganan kemiskinan yang bersifat kelembagaan (institutional) biasanya didasari oleh pertimbangan ini. Beberapa bentuk PROKESOS yang telah dan sedang dikembangkan oleh Depsos dapat disederhanakan menjadi: Pendekatan pertama yaitu pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh panti-panti social dan Program jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan social. Pendekatan kedua, yang melihat si miskin dalam konteks situasinya, strategi pekerjaan sosial berpijak pada prinsip-prinsip individualisation dan self-determinism yang melihat si miskin secara individual yang memiliki masalah dan kemampuan unik. Program anti kemiskinan dalam kacamata ini disesuaikan dengan kejadian-kejadian dan/atau masalah-masalah yang dihadapinya.

PROKESOS penanganan kemiskinan yang pada prinsipnya memadukan pendekatan neoliberal dan sosial demokrat ini dapat dikategorikan kedalam beberapa strategi: yaitu strategi kedaruratan. Misalnya, bantuan uang, barang dan tenaga bagi korban bencana alam, strategi kesementaraan atau residual. Misalnya, bantuan stimulan untuk usaha-usaha ekonomis produktif. Strategi pemberdayaan. Misalnya, program pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan anak dan remaja, serta strategi “penanganan bagian yang hilang”.

Strategi yang oleh Caroline Moser disebut sebagai “*the missing piece strategy*” ini meliputi program-program yang dianggap dapat memutuskan rantai kemiskinan melalui penanganan salah satu aspek kunci kemiskinan yang kalau “disentuh” akan membawa dampak pada aspek-aspek lainnya. Misalnya, pemberian kredit, program KUBE atau Kelompok Usaha Bersama.

2.3 Kerangka pikir



2.4 Hipotesis

Diduga bahwa type kemiskinan Kultural lebih dominan dibandingkan dengan type kemiskinan struktural dan natural di Kota Makassar.

2.5 Tipe-tipe Kemiskinan dan indikatornya

Ada banyak pendapat para ahli yang menjelaskan tentang tipe-tipe kemiskinan yang ada di Indonesia. Diantaranya adalah pembagian kemiskinan menjadi, kemiskinan natural, kultural dan struktural.

TABEL 2.5 TIPE-TIPE KEMISKINAN DAN INDIKATOR

Kemiskinan	Ukuran
Natural	□ □ Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah dan indikatornya seperti: tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan yang berpengaruh terhadap kemampuan SDM sehingga tingkat produktifitas rendah.
Kultural	□ Kemiskinan yang disebabkan oleh perbedaan adat-istiadat, dan indikatornya seperti: perbedaan etika kerja dan jumlah anggota keluarga yang banyak. Kemiskinan ini mengacu pada sikap seseorang yang disebabkan gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayannya. Termasuk kepercayaan bahwa kemiskinan adalah

	takdir Tuhan yang harus diterima.
Struktural	□ Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia dan indikatornya seperti: distribusi aset produktif yang tidak merata, kebijakan ekonomi yang diskriminatif, korupsi-kolusi, tatanan perekonomian yang menguntungkan kelompok masyarakat tertentu, serta rendahnya akses bagi kaum miskin.

2.6 Studi Empiris

Syaifuddin (2007), membagi cara berpikir yang memandang kemiskinan sebagai gejala absolut; dan, sebagai gejala relatif. Cara berfikir (model) mengenai kemiskinan sebagai gejala absolut memandang kemiskinan sebagai kondisi serba berkekurangan materi, hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki sarana untuk mendukung kehidupan sendiri. Cara pandang relativistik ini terdiri atas dua cara pandang, yakni cara pandang (model) kebudayaan, dan cara pandang (model) struktural. Kemudian, bermula pada tahun 1990-an, terjadi perkembangan baru dalam pendekatan terhadap kemiskinan, yakni memandang kemiskinan sebagai proses. Pendekatan proses mengenai kemiskinan baru saja dikenal di Indonesia. Untuk sebagian besar, pendekatan yang digunakan di ruang ilmiah maupun praktis masih didominasi pendekatan kebudayaan dan struktural sebagaimana dibicarakan di atas. Kedudukan dan otoritas peneliti - dan pemerintah dalam konteks praktis

- dominan dalam pendekatan kebudayaan (lihat, Lewis 1961, 1966) dan struktural (lihat, Valentine 1968) mengenai kemiskinan. Dengan kata lain, “orang miskin” dalam kedua model kemiskinan ini dilihat sebagai obyek, baik sebagai sasaran penelitian maupun sebagai sasaran program kebijakan.

Mubyarto (2009) dalam tulisannya tentang *“Mencari Akar Kemiskinan di Indonesia”*, dijelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan absolut atau kemiskinan relatif. Pernyataan menarik dari Mubyarto ialah *“Mengapa kita miskin padahal negeri kita kaya akan sumber daya alam?”* Ada beberapa jawaban untuk pertanyaan di atas, salah satunya adalah: *“Kemiskinan disebabkan ketidakmampuan negara dalam mengelola sumber daya alam. Jika memang kemiskinan disebabkan ketidakmampuan negara dalam mengelola sumber daya alam, tentu masalah tersebut telah lama dapat diselesaikan dengan masuknya investor asing.*

Mereka para investor asing datang membawa modal dan teknologi untuk mengelola sumber daya alam Indonesia dengan “baik”. Hasilnya, kemiskinan tetap menjadi sahabat bagi mayoritas penduduk Indonesia. Jawaban lain atas pertanyaan di atas adalah: *“Kemiskinan disebabkan kesalahan dalam distribusi sumber daya alam, sehingga kekayaan (yang diperoleh dari sumber daya alam) tidak dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia, melainkan hanya beredar atau dikuasai oleh segelintir orang.”*